

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Menurut konsepsi tersebut, maka di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan diajarkan pula materi tentang konsep budaya politik dengan harapan akan membekali siswa di dalam menggunakan aspirasi politiknya sebagai pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia.

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, warga negara khususnya pemilih pemula harus memiliki keterampilan warga negara (*civic skills*) yang baik agar mampu menyalurkan aspirasinya dengan baik pula tak terkecuali bagi para pemilih pemula yang saat ini rata-rata masih duduk dibangku kelas XI Sekolah Menengah Atas. Sangat penting membangun keterampilan warga negara (*civics skill*) dalam berpolitik sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah dalam rangka pembentukan warga negara yang baik dan cerdas (*good & smart citizen*). Siswa dapat belajar berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-

rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik secara mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. Siswa juga seyogyanya mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isu-isu politik melalui media elektronik maupun media massa.

Pengetahuan yang mumpuni khususnya dalam konsep budaya politik di Indonesia agar mampu berpikir kritis dalam memahami isu-isu politik tertentu, sejarahnya, relevansinya dimasa kini, serta pertimbangan manfaat dan mudhorotnya sangat penting dikuasai oleh warga negara yang salah satu penanamannya dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah memiliki pengetahuan, pemilih pemula haruslah mempunyai sikap dalam menyalurkan aspirasi politiknya serta mempertanggungjawabkannya, dalam hal ini memiliki kemampuan untuk memahami fungsi-fungsi dan proses-proses seperti *check and balances legislative* atau peninjauan ulang hukum (*judicial riview*). Dengan pemahaman tersebut membantu warga negara termasuk didalamnya adalah para pemilih pemula untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lebih lama.

Pendidikan politik bagi warga negara yang menjadi pemilih pemula merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan merupakan usaha sadar membimbing anak kearah kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Pendidikan berusaha untuk mengembangkan potensi yang telah ada pada anak dengan memberi bekal sebaik

mungkin agar anak tersebut berpikir serta bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dilakukan sebagai makhluk yang bertuhan dan makhluk sosial.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa serta beberapa perangkat belajar lainnya. Di sekolah siswa mendapatkan berbagai bantuan dan bimbingan terutama dari guru melalui penyampaian informasi berupa pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap atau perilaku politik yang sesuai demi tercapainya warga negara yang baik dan cerdas (*good & smart citizen*).

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang yang tepat untuk menanamkan nilai nilai pendidikan politik khususnya konsep budaya politik bangsa indonesia. Hal ini dikarenakan pada jenjang SMA khususnya pada kelas XI mayoritas siswa telah mencapai usia 17 tahun dengan perhitungan bahwa anak masuk SD pada usia 5 tahun kemudian masuk SMP pada usia 12 tahun sehingga pada Kelas XI SMA mereka genap berusia 17 tahun, yang berarti bahwa siswa tersebut telah menjadi pemilih pemula dalam pemilu dan berhak menyalurkan aspirasinya.

SMA Al-Kautsar Kota Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang terkemuka di provinsi Lampung. Para siswanya pun tak hanya berasal dari sekitar wilayah Bandar Lampung namun juga banyak yang berasal dari luar wilayah bandar Bandar Lampung, bahkan banyak juga yang berasal dari wilayah Palembang provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terbukti dengan adanya asrama bagi para siswa. Dengan beragamnya asal usul siswa-siswi di perguruan Al-Kautsar tentu sangat mempengaruhi partisipasi politik mereka terutama saat PEMILU baik

PEMILUKADA maupun PEMILU Nasional. Hal ini dikarenakan, walaupun usia mereka telah mencapai 17 tahun namun mereka acuh tak acuh untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) sebagai prasyarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu dengan alasan jauhnya tempat tinggal untuk membuat KTP. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa enggan untuk menyalurkan aspirasinya dikarenakan tidak mengetahui alur/tata cara/ prasyarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu.

Partisipasi dalam pemilu merupakan tujuan akhir dari pendidikan politik khususnya materi konsep budaya politik yang dibelajarkan pada siswa kelas XI SMA Al-Kautsar yang rata-rata telah berusia 17 tahun agar mereka antusias terhadap PEMILU sebagai wujud demokratisasi Indonesia. Para siswa-siswi kelas XI SMA Al-Kautsar yang telah menjadi pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik yang mumpuni agar mampu memaksimalkan partisipasi politik mereka terutama dalam kancah PEMILU sebagai wujud demokratisasi warga negara. Selain itu, penguasaan pendidikan politik yang mumpuni sangat berguna untuk mencegah manipulasi suara dalam PEMILU karena mereka adalah sasaran empuk bagi peminat suara (politik) yang menginginkan kemenangan dalam pemilu. Tak jarang banyak ditemui kasus pelaksanaan kampanye yang dilakukan disekolah, meski melanggar peraturan yang ada namun hal tersebut sering kita jumpai demi mendapatkan suara politik sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, pada jenjang ini mata pelajaran PKn membekali siswa dengan materi budaya politik untuk mengantisipasi hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa SMA Al-Kautsar Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang memiliki jumlah pemilih pemula yang banyak dibandingkan dengan sekolah lain. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang ada pada setiap tingkatan kelasnya. Kelas X sampai dengan kelas XII masing-masing terdiri dari 8 kelas untuk kelas X, 7 kelas untuk kelas XI, dan 8 kelas untuk kelas XII. Masing-masing kelas setidaknya diisi oleh 36-45 siswa. Jadi total ruang belajar di SMA Negeri 1 Al-Kautsar mencapai 23 ruang dengan jumlah siswa mencapai 922. Berikut tabel data siswa SMA Al-Kautsar usia 17 tahun berdasarkan kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Siswa Usia 17 Tahun

No	Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa Usia 17 Tahun
1	X (1-8)	329	-
2	XI S1	41	39
3	XI S2	41	37
4	XI S3	41	40
5	XI A1	36	34
6	XI A2	36	36
7	XI A3	45	43
8	XI A4	45	42
9	XII S1	37	37
10	XII S2	39	39
11	XII S3	36	36
12	XII S4	37	37
13	XII A1	36	36
14	XII A2	35	35
15	XII A3	44	44
16	XII A4	44	44
Jmlh		922	579

Sumber : Analisis Data Primer SMA Al-Kautsar Tahun 2011

Berdasarkan data diatas, dari keseluruhan siswa yang ada di SMA Al- Kautsar Bandar Lampung 62,8% telah berusia 17 tahun. Hal tersebut berarti lebih dari sebagian jumlah keseluruhan siswa telah memiliki hak pemilih dalam pemilu,

termasuk didalamnya adalah pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pada pemilu kepala daerah (PEMILUKADA) september 2010-2011 lalu misalnya, banyak siswa yang telah menjadi pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Lintang seorang siswi kelas XI IPA 2 menyatakan bahwa, ”kebanyakan siswa-siswi yang telah menjadi pemilih pemula namun tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan sebagian besar diantara mereka tidak mendapatkan surat panggilan untuk memilih dari ketua Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat, pada hari pelaksanaan pemilu kebanyakan siswa-siswi yang rata-rata mereka adalah anak kost/ asrama tidak pulang kekampungnya karean liburnya hanya satu hari sehingga *nanggung* untuk pulang kampung sehingga mereka terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya”.

Dari pengamatan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung banyak pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini diduga kurangnya pemahaman siswa kelas XI terhadap pembelajaran konsep budaya politik disekolah, hal ini tercermin dari kurangnya pemahaman siswa dalam melaksanakan tata cara dan memenuhi pra syarat PEMILUKADA maupun PEMILU nasional. Upaya peningkatan tingkat aspirasi politik pemula pun telah dilaksanakan secara optimal walaupun dengan terbatasnya jam pelajaran yang tersedia, Bapak Sujarwo selaku guru mata pelajaran PKn untuk kelas XI menuturkan bahwa, “proses pembelajaran untuk SK Budaya Politik di Indonesia sudah diajarkan secara maksimal sebagai upaya meningkatkan partisipasi politiknya melalui pemilu, termasuk didalamnya mengenai menampilkan peran serta dalam budaya politik

partisipan dimana siswa kelas XI rata-rata telah memiliki hak pilih sebagai pemilih pemula dan penggunaan hak tersebut dalam pemilu.

Kondisi pemilih pemula di SMA Al- Kautsar memang tergolong memprihatinkan dalam hal kesadaran untuk berpartisipasi dalam demokratisasi Indonesia. Sebagian besar cenderung mengabaikan peran partisipasi politik dengan alasan mereka masih sebagai pelajar, yang hanya berkewajiban untuk belajar. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya suara politik mereka mempunyai andil dalam proses pembangunan Indonesia yang berkelanjutan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Siswa-siswi Al-Kautsar yang telah menjadi pemilih pemula enggan *beribet* untuk mengurus keikutsertaannya dalam pemilu, mengingat baru pertama kalinya mereka ikut serta sehingga memang persyaratannya agak banyak.

SK Budaya Politik di Indonesia pada kurikulum memang tergolong materi yang padat, sehingga pengoptimalan materinya belum dilaksanakan secara maksimal karena terbentur jam pelajaran yang terbatas”. Lebih jelasnya berikut adalah data hasil pra-penelitian mengenai jumlah pemilih pemula di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung:

Tabel 1.2 Data Jumlah Pemilih Pemula Yang Menggunakan Hak Pilih

No.	Jumlah Siswa	Jumlah Pemilih Pemula	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Yang Tidak menggunakan Hak Pilih
S1	41	39	15	24
S2	41	37	17	20
S3	41	40	13	27
A1	36	34	18	16
A2	36	36	19	17
A3	45	43	21	22
A4	45	42	20	22
Jmlh	285	271	123	148

Sumber : Analisis Data Primer

Berdasarkan data pada tabel 1.2 disimpulkan bahwa siswa keseluruhan berjumlah 285 orang, pemilih pemula berjumlah 271 orang, jumlah siswa yang menggunakan hak pilih sebanyak 123 orang dan siswa yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 148 orang. Jadi, masih banyak siswa yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu sekitar 54,6% dari jumlah pemilih pemula.

Fakta yang telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya indikasi tentang tingkat aspirasi politik pemilih pemula di SMA Al-Kautsar belum dapat dicapai secara maksimal hal ini dikarenakan kurang pedulinya siswa terhadap pembelajaran konsep budaya politik. Oleh karena itu, penelitian pengaruh pemahaman siswa tentang konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi pemilih pemula di SMA Al-Kautsar sangatlah penting dan tepat. Karena Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, melainkan pula melalui pendidikan secara lebih luas. Peningkatan pemahaman siswa tentang konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap meningkatnya aspirasi politik pemilih pemula sehingga siswa mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia sehingga demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan berkesinambungan untuk mewujudkan indonesia yang adil dan makmur.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Keikutsertaan dalam pemilihan umum mencakup seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali bagi para pemilih pemula dalam hal ini merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan yang dilaksanakan sebagai perwujudan warganegara yang baik dan ikut serta menentukan nasib bangsanya.
- 2) Tingkat pemahaman siswa terhadap konsep budaya politik dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat rendah.
- 3) Tingkat kematangan siswa dalam penggunaan atau penyaluran aspirasi politiknya masih rendah.
- 4) Banyak siswa yang telah menjadi pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya.
- 5) Aspirasi politik pemilih pemula di SMA Al-Kautsar masih rendah.
- 6) Pembentukan *civic skills* kepada pemilih pemula belum maksimal
- 7) Perhatian terhadap aktivitas atau kegiatan politik masih rendah.
- 8) proses pembelajaran untuk SK Budaya Politik di Indonesia sudah diajarkan secara maksimal, termasuk mengenai menampilkan peran serta dalam budaya politik partisipan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi, penulis membatasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik.
2. Kemampuan guru dalam pembentukan *civic skills* siswa kelas XI.
3. Tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula ?
2. Apakah terdapat pengaruh pembentukan *civic skills* siswa terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula ?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik terhadap pembentukan *civic skills* siswa SMA Al-Kautsar?
4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula ?
5. Apakah terdapat pengaruh pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik melalui pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pemahaman dalam memahami konsep budaya politik terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula

2. Mengetahui pengaruh kemampuan guru dalam pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula
3. Mengetahui pengaruh pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* terhadap siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula
4. Mengetahui pengaruh pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik terhadap pembentukan *civic skills* tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula
5. Mengetahui pengaruh pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik melalui pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula

1.5.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperkaya konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup kajian 10 tradisi yaitu *civic transmission* dalam pendidikan IPS yang dalam penelitian ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman pemahaman konsep politik, pembentukan *civic skills* dan peningkatan aspirasi politik pemilih pemula melalui pembelajaran PKn di sekolah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi siswa adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan memahami dan menjelaskan konsep dan nilai dalam materi Kewarganegaraan (ranah kognitif).
- b. Meningkatkan kemampuan emosional (ranah afektif).
- c. Meningkatkan keterampilan berwarganegara (ranah psikomotorik).

2. Bagi guru adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan guru dalam pemahaman konsep budaya politik dalam pembelajaran PKn.
- b. Meningkatkan kemampuan guru dalam pembentukan *civic skills* dalam pembelajaran PKn.
- c. Meningkatkan kemampuan guru dalam penyajian materi pelajaran sesuai dengan prinsip metodologis mengajar PKn.
- d. Memaksimalkan tujuan pembelajaran ranah terpadu dalam mata pelajaran PKn.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pembelajaran terpadu dalam Pendidikan IPS.

3. Bagi sekolah adalah:

- a. Memberdayakan sekolah agar dapat menjadi media yang baik dalam penyaluran aspirasi politik pemilih pemula.

- b. Memberdayakan manajemen sekolah sebagai institusi massal untuk mendukung jalannya demokrasi di Indonesia.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Ke-IPS-an

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan IPS dengan wilayah kajian pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari sepuluh tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, yaitu dalam rangka membentuk warganegara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) dalam partisi politiknya dalam demokratisasi Indonesia.

Pembelajaran Pendidikan IPS diharapkan dapat berkembang pada diri siswa, khususnya kemampuan agar siswa mampu hidup di tengah – tengah masyarakat. Seperti dikemukakan Fenton dalam Sujarwo (2011:95) bahwa, tujuan studi social adalah *“prepare children to be good citizen : social studies teach children how to think and : social studies pass on the cultural heritage”*. (Pembelajaran Pendidikan IPS mendidik anak menjadi warga negara yang baik, mampu berfikir, dan mewariskan kebudayaan kepada generasi penerusnya). Sedangkan menurut Jarolimek dalam Sujarwo (2011:95) bahwa : *social studies education has as its particular mission the task of helping young people develop competencies that enable them to deal with , and to some extent manage , the physical and social forces of in which they live. Such competencies make it possible for pupil to shape their lives on harmony with those forces.*

Tujuan ini akan dicapai dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. PKn adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak – hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship tranmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek social budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atauan penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatn terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional.

1.6.2 Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah konsep budaya politik, *civic skills* dan aspirasi politik.

1.6.3 Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah para siswa kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang telah memiliki hak untuk memilih (Pemilih Pemula)

1.6.4 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Kautsar Kota Bandar Lampung.

1.6.5 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012.